AKNTANSI DANA DI PEMERINTAH

Dalam pelaksanaan akuntansi dana, pemerintah membagi kelompok dananya menjadi dua yaitu:

- ***Expendable fund***, daisebut juga *governmental fund*, yang digunakan untuk belanja operasional/ pengurusan keperluan pemerintah sehari-hari.
- ***Nonexpendable fund***, disebut juga *propriertary fund*, yang tidak boleh dibelanjakan untuk urusan pemerintah karena telah dipisahkan dan digunakan untuk aktivitas bisnis.

Dana pemerintah (*governmental fund*) sendiri kemudian dibagi menjadi beberapa dana mengingat pemerintah memiliki beragam keperluan. Dalam praktik akuntansi pemerintah di AS, dana pemerintah ini dibagi menjadi:

- **Dana Umum** (*General Fund*), digunakan untuk keperluan umum pemerintah.
- **Dana Proyek Modal** (*Capital Project Fund*), digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.
- **Dana Pelunasan Utang** (*Debt Service Fund*), digunakan untuk membiayai utang-utang pemerintah.

Setelah anggaran disediakan, pelaksanaan akuntansi dala, periode 20x1 dimulai. Bagaimana pencatatan yang dilakukan? Pada dasarnya terdapat lima jenis jurnal dalam pencatatan di Dana Umum, yaitu:

- Jurnal anggaran
- Jurnal pendapatan
- Jurnal belanja
- Jurnal penyesuaian
- Jurnal penutup

PENGERTIAN DANA DAN PENGELOLAAN DANA DALAM ORGANISASI NON PROFIT

Dana (Fund): "kesatuan fiskal dan kesatuan akuntansi yang berdiri sendiri dengan satu perangkat rekening yang saling berimbang (self balancing) untuk membukukan kas dan sumber lainnya bersama-sama dengan utang, kewajiban-kewajiban, cadangan-cadangan, dan hak milik yang disisihkan dengan maksud untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu atau pencapaian tujuan tertentu sesuai dengan peraturan, restriksi, atau limitasi yang ada".

- “Didalam organisai nonprofit, khususnya pemerintahan, dana dapat pula disebut dengan istilah “Keuangan Negara”. Penggunaan dana atau keuangan negara tersebut hanya diperbolehkan dalam batas yang telah di apropriasi, yaitu otorisasi pengeluaran untuk tujuan tertentu. Setiap dana belanja, harus dibuatkan anggaran dan apabila anggaran ini telah disetujui oleh yang berwenang (legislatif), maka taksiran anggaran pengeluaran ini menjadi appropriasi”
- Appropriasi harus menunjukkan dari dana manakah pengeluaran itu dilakukan dan untuk apa pengeluaran itu, dan juga harus nenunjukkan jumlah maksimum pengeluara dan jangka waktu pengeluaran.

Keuangan Negara

Adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut

KEU
NEG

1. Hak Negara untuk
   - memungut pajak
   - mengeluarkan dan mengedarkan uang
   - melakukan pinjaman
2. Kewajiban Negara untuk
   - tugas layanan umum
   - membayar tagihan pihak ketiga
3. Pemerimaan
   - Negara
   - Daerah
4. Pengeluaran
   - Negara
   - Daerah
5. Kekayaan Negara / Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain
6. Kekayaan pihak lain, yang dikuasai Pemerintah
7. Kekayaan pihak lain, dengan fasilitas Pemerintah

SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI

- Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
- Surat Edaran Mendagri : SE.900/316/BAKD

AKUNTANSI SATUAN KERJA

Prosedur Akuntansi pada SKPD :

- Pencatatan
- Pengikhtisaran
- Pelaporan Keuangan

Pertanggungjawaban APBD

Proses

Pelaksanaan

Sumber : Permendagri 13/2006 Psl 241-264)

KONSTRUKSI KEUANGAN DAERAH :

- Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
- Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)

-Pihak Terkait :

-- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

-- Bendahara Di SKPD

KONSTRUKSI KEUANGAN DAERAH :

-Pihak Terkait :

-- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

- a. Mencatat transaksi-transaksi pendapatan, belanja, aset dan selain kas berdasarkan bukti-
- bukti yang terkait
- b. Memposting jurnal-jurnal pendapatan, belanja, aset dan selain kas ke dalam buku besarnya
- masing-masing
- c. Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari : LRA, Neraca, dan CALK

-- Bendahara Di SKPD

- Menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan
  akuntansi SKPD

AKUNTANSI ANGGARAN

PP No. 24 Thn 2005
Tentang S.A.P

Teknik Pertanggungjawaban

Pengendalian Manajemen

Pengelolaan :
- Pendapatan
- Belanja
- Transfer
- Pembiayaan

Dokumen Pelaksana Anggaran → Akuntansi Anggaran

Disahkan

PPKD

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Contoh Jurnal :

Estimasi Pendapatan Defisit	xxx xxx
Apropriasi Belanja Surplus	xxx xxx

Angka Laporan dalam kolom Anggaran dilaporan Realisasi Anggaran (LRA)

AKUNTANSI PENDAPATAN

Pendapatan Daerah : Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih

Akuntansi Pendapatan SKPD hanya untuk mencatat pendapatan asli daerah yang dalam wewenang SKPD.

Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya.

Langkah 1

a. PPK-SKPD menerima SPJ penerimaan dari bendahara penerimaan
b. Berdasarkan dokumen SPJ penerimaan dan lampirannya, PPK-SKPD mencatat transaksi pendapatan dengan menjurnal :

Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	
Pendapatan		xxx

Untuk transaksi pendapatan ini akan dibuat buku jurnal khusus pendapatan karena jurnal yang sama akan dipakai terus dalam mencatat transaksi pendapatan.

Contoh Format dokumen Jurnal Khusus Pendapatan

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA …….
BUKU JURNAL KHUSUS PENDAPATAN

SKPD :
Kode Rekening yang di Debit :

Halaman ……..

Tanggal	No. Bukti		Kode Rekening yang di Kredit	Uraian	REf	Jumlah (Rp)	Akumulasi (Rp)
	Bukti Pembayaran	Bukti Lain					
1	2		3	4	5	6	7

……..,…….

PPK-SKPD

(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP

c. Pendapatan yang diterima kemudian disetor ke Kas Daerah.
PPK-SKPD kemudian mencatat transaksi penyetoran tersebut

RK-PPKD	xxx	
Kas di Bendahara Penerimaan		xxx

Catatan : Pada saat setoran pendapatan diterima di Rekening Kas Daerah, Akuntansi PPKD akan mencatat transaksi penerimaan tersebut dengan Jurnal

Kas di Kas Daerah	xxx	
RK Satker		xxx

Langkah 2

a. Setiap periode, Junal-jurnal tersebut akan diposting ke buku besar SKPD sesuai dengan kode rekening Pendapatan.

Contoh Format Buku Besar SKPD

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ……

BUKU BESAR

SKPD :
KODE REKENING :
NAMA REKENING :
PAGU APBD :
PAGU PERUBAHAN APBD :

Tanggal	Uraian	REf	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
	Jumlah				

Tanggal…….

PPK-SKPD

Tanda Tangan
Nama Lengkap
NIP

b. Di akhir periode tertentu, PPK-SKPD memindahkan saldo-saldo yang ada ditiap buku besar ke dalam Neraca Saldo.

Contoh Format Neraca Saldo

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA …….
NERACA SALDO PER TANGGAL …….

SKPD : Halaman …….

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	
		Debet	Kredit

Tanggal…….

PPK-SKPD

Tanda Tangan
Nama Lengkap
NIP

Akuntasi Belanja

Belanja Daerah : Kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Akuntansi belanja pada satuan kerja dilakukan oleh PPK-SKPD.

Yang meliputi :

- Akuntansi Belanja UP (Uang : Persediaan)
- Akuntansi Belanja GU (Ganti Uang)
- Akuntansi Belanja TU (Tambah Uang)
- Akuntansi Belanja LS (langsung)

1. Akuntansi Belanja UP/GU/TU

Langkah 1

PPK-SKPD menerima SP2D dari kuasa BUD melalui pengguna Anggaran.

Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	
RK PPKD		xxx

Langkah 2

Secara berkala, PPK-SKPD menerima SPJ dari bendahara Pengeluaran. SPJ tersebut dilampiri dengan bukti transaksi

Belanja ……	xxx	
Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

2. Akuntansi Belanja LS

PPK-SKPD menerima SP2D dari Kuasa BUD melalui pengguna Anggaran.

Belanja ……	xxx	
RK PPKD		xxx

Dalam Kasus LS Barang dan Jasa, seringkali terdapat potongan pajak.

Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	
Hutang Pajak ……..		xxx

Untuk transaksi belanja yang menghasilkan asset tetap, PPK-SKPD mengakui sebagai penambahan asset

Belanja Modal …….	xxx	
Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

Asset ……	xxx	
Diinvestasikan Dlm Asset Tetap		xxx

Akuntasi Aset SKPD

Prosedur Akuntansi Aset meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas :
- Perolehan
- Pemeliharaan
- Rehabilitasi
- Perubahan Klasifikasi
- Penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPD

Transaksi tersebut digolongkan dalam 2 kelompok besar transaksi :
- Penambahan Nilai Aset
- Pengurangan Nilai Aset

Langkah 1
Berdasarkan bukti transaksi yang berupa :
a. Berita acara penerimaan barang dan atau
b. Berita acara serah terima barang dan atau
c. Berita acara penyelesaian pekerjaan

Langkah 2
Penambahan Nilai Aset

Aset….
Diinvestasikan dlm Aset Tetap

Pengurangan Aset

Diinvestasikan dlam Aset Tetap
Aset……..

Akuntasi Selain Kas

Prosedur Akuntansi Selain Kas meliputi serangkaian proses pencatatan dan pelaporan akuntansi sampai dengan pelaporan keuangan

Transaksi tersebut meliputi setidakknya
- Koreksi Kesalahan pencatatan
- Pengakuan Aset, hutang dan ekuitas
- Jurnal Depresiasi
- Jurnal terkait dengan transaksi yang bersifat accrual dan prepayment

Contoh kasus….(format word)